



Buletin

Parlementaria

Nomor 1021/II/VIII/2018 • Agustus 2018

BHINNEKA TUNGGAL IKA

RAPBN 2019 Harus Optimalkan Target RPJMN



9 772614 339005

DPR RI Menuju Parlemen Terbuka

RAPBN 2019 Harus Optimalkan Pencapaian Target RPJMN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 yang beragendakan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, dan Pidato Presiden RI sebagai Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Nota Keuangan.



Pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, dan Pimpinan DPD RI berfoto bersama Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD-DPR RI, dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019

Foto: Rumi | Od

“ Pidato Presiden mengenai RUU tentang APBN Tahun 2019 dan Nota Keuangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPR RI dalam rangka menetapkan APBN. RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2019 ini merupakan APBN terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, seharusnya diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMN,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Hadir dalam Rapat Paripurna ini, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan DPD RI, Menteri di Kabinet Kerja, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara, serta masyarakat berprestasi dan teladan.

Pada Semester I Tahun 2018, jelas Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai 38,4 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 36,5 persen. Sedangkan dari sisi Pendapatan Negara, realisasi Semester I Tahun 2018 telah mencapai 44 persen, lebih tinggi dari realisasi periode yang tahun 2017 sebesar 41,5 persen.

“Namun demikian, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK). Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” imbuh Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, walaupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan banyak keberhasilan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2019, antara lain, meningkatkan fondasi sendi-sendi makro ekonomi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan potensi ekonomi daerah;

pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, serta kemampuan dan kesinambungan fiskal.

“Kami mengharapkan agar di penghujung masa pemerintahan ini, pembangunan ekonomi benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendati pemerintah akan disibukkan dengan agenda politik nasional, Pileg dan Pilpres, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi sedikitpun komitmen untuk terus bekerja keras membuat prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” harap politisi Partai Golkar itu.

Bamsuet tak memungkir, perkembangan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global yang terjadi di berbagai kawasan. Membaiknya kondisi perekonomian di beberapa negara maju memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

“Seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga The FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini. Risiko itulah yang perlu kita antisipasi melalui mitigasi risiko yang tertuang dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019,” jelas Bamsuet.

Bamsuet memaparkan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI merupakan tolok ukur dari kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Kinerja fungsi legislasi Dewan harus dimaknai dari sisi kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Dalam konteks itu, DPR RI telah menyetujui RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBPN) menjadi undang-undang. Dengan Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara, memperkuat ketahanan fiskal, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” imbuh Bamsuet.

Bamsuet memastikan, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU, antara lain, RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Semua itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan PNBPN.

“Kemudian sebagai bentuk komitmen DPR RI terhadap pemerataan pembangunan, perlu ada dorongan untuk menyelesaikan RUU tentang Daerah Kepulauan. Kehadiran RUU ini sangat penting untuk mendorong pemerataan serta percepatan pembangunan di daerah kepulauan, dengan memberikan alokasi anggaran secara khusus dalam APBN. Mengingat daerah-daerah kepulauan, terutama di kawasan Indonesia Timur, masih jauh tertinggal dibanding dengan daerah-daerah yang lain,” kata Bamsuet.

Dinamika politik internasional yang berkembang saat ini, lanjut Bamsuet, melahirkan tantangan-tantangan baru bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. DPR RI melihat Pemerintah telah menyusun sejumlah langkah untuk merespons perkembangan tersebut, antara lain dengan menawarkan konsep Indo-Pasifik untuk membangun arsitektur kawasan yang sejahtera dan damai.

“DPR RI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki, karena bangsa ini hanya dapat tumbuh sejahtera di lingkungan yang aman dan damai,” tegas Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Namun DPR RI juga mengingatkan Pemerintah agar segala upaya kita untuk berkontribusi bagi terciptanya stabilitas dan kemakmuran kawasan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Dan memastikan bahwa langkah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan fungsi diplomasi Parlemen, DPR dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Konsultasi Ketua-ketua Parlemen 5 negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan, Australia/MIKTA. DPR juga akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri Sidang Umum Parlemen ASEAN (AIPA) ke 39, pada tanggal 3-7 September 2018 di Singapura. “Syukur alhamdulillah peran diplomasi DPR, diakui oleh pemerintah, semakin penting dalam memperkuat diplomasi Indonesia di fora internasional,” tutup Bamsuet. ■ tim



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Foto: Jaka/Rni

Ketua DPR: Kondusifitas Pemilu 2019 Perlu Dijaga

Pemilu serentak yang menghadirkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019, perlu dijaga kondusifitasnya. Pemilu tahun depan harus mencerminkan kegembiraan pesta demokrasi. Rakyat berdaulat memilih para wakilnya di parlemen sekaligus memilih presiden untuk periode lima tahun mendatang.

“Pemilu langsung untuk memilih presiden dan anggota DPR/ DPRD adalah refleksi kedaulatan rakyat. Karenanya dideskripsikan juga sebagai pesta demokrasi. Maka, implementasi kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam suasana penuh kegembiraan dan memberi kebebasan seluas-luas bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihannya,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (13/8).

Bamsuet, sapaan akrabnya melanjutkan, tinggal bagaimana menjaga suasana pesta demokrasi yang menggembirakan tersebut tetap kondusif. Perbedaan pilihan jadi keniscayaan yang harus diterima. Perbedaan tidak harus diperdebatkan atau dipertentangkan. Setiap orang selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama, termasuk

dengan keluarga sendiri.

“Pesannya adalah beda pilihan tidak boleh merusak kondusifitas yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang,” ucap Ketua Badan Bela Negara FKPPi ini.

Dikatakan Bamsuet, kini persiapan menuju Pilpres dan Pileg 2019 sudah terlaksana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menutup masa pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018 lalu.

Penutupan masa pendaftaran dilakukan setelah dua kandidat pasangan Capres-Cawapres mendaftar dan menyerahkan dokumen pencalonan. Masing-masing adalah pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pasangan pertama didukung koalisi

yang beranggotakan PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Sementara pasangan kedua didukung koalisi beranggotakan PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Sebelumnya, 17 Juli 2018 lalu, KPU juga sudah menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif.

Setelah itu, masih kata politisi Partai Golkar itu, kedua kandidat pasangan Capres-Cawapres dan semua Parpol serta calon anggota legislatifnya harus melakukan konsolidasi dengan memetakan basis suara, membaca kekuatan lawan, membentuk tim pemenang, dan menyusun program-program.

Bamsuet menyayangkan pasca pendaftaran kandidat pasangan Capres-Cawapres, ruang publik masih disesaki

dengan pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik. Masing-masing kubu diimbau menahan diri. Kondusifitas politik 2019 sangat bergantung pada perilaku masing-masing kubu Capres-Cawapres. Ia juga menilai pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin merupakan perpaduan tepat, nasionalis-religius.

“KH Maruf Amin adalah guru bangsa, ulama, dan juga negarawan yang pendapatnya selalu didengar khalayak. Perpaduan yang tepat dan bijaksana ini menjadi pilihan karena diyakini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkini. Kedua sosok ini akan fokus pada upaya mengakhiri sekat-sekat yang selama ini bermunculan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” urai Bamsuet.

Sebagai petahana, lanjut Bamsuet, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tinggal meneruskan dan mempertajam upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Publik juga tentu menunggu program dan strategi apa yang akan ditawarkan Prabowo-Sandi untuk menyelesaikan ragam persoalan.

“Pemaparan program dan strategi kedua sosok calon pemimpin itu bisa dilakukan sepanjang periode kampanye Pilpres 2019. Kini, dalam suasana yang mestinya kondusif, mulailah fokus menyusun program dan strategi itu,” tutup mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

■ mh/sf



Foto: Naefuroji/Rni

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada acara Open Government Partnership (OGP)

DPR RI Menuju Parlemen Terbuka

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung penganangan DPR RI yang lebih terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP). Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan konsep Parlemen Modern yang menjadi visi misi DPR RI sejak tahun 2015. Karenanya, DPR RI perlu mendeklarasikan diri sebagai Parlemen Terbuka.

“Secara *de facto*, kita sudah menjalankan prinsip *open parliament*. Karena itu untuk deklarasi DPR RI sebagai parlemen terbuka hanya pengakuan secara *de jure* (hukum),” papar Fadli dalam *Forum Group Discussion* (FGD) bertema ‘Persiapan DPR RI Menuju Parlemen Terbuka dan Rencana Aksi Parlemen’, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Fadli menuturkan, prinsip-prinsip keterbukaan parlemen sesuai dengan indikator utama Parlemen Modern, diantaranya keterbukaan atau transparansi dan pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi. Sehingga, sejatinya DPR RI telah menjalankan mekanisme keterbukaan parlemen sejak lama.

Misalnya dalam hal keterbukaan, sambung politisi Partai Gerindra itu, hampir 98 persen kegiatan kedewanan di DPR RI bersifat terbuka dan data-data serta hasil rapat pun bisa diakses publik melalui *website* resmi DPR RI (www.dpr.go.id) dan Radio dan TV Parlemen.

“Sehingga syarat-syarat parlemen terbuka sudah dipenuhi. Kita juga ketahui keterbukaan dan akses terhadap dokumen semuanya terbuka. Boleh dibilang yang tertutup hanya sedikit, yang terkait dengan keamanan dan kebijakan politik luar negeri,” jelasnya.

Fadli menambahkan, dengan dideklarasikannya DPR RI sebagai Parlemen Terbuka, maka Indonesia bisa mengikuti standar internasional akan keterbukaan serta menjalankan

komitmennya dalam *Open Parliament Partnership* yang juga merupakan bagian dari OGP. Selain itu, diharapkan nantinya Indonesia dapat menjadi *leader* dalam *Open Parliament Partnership* yang baru beranggotakan 9 negara.

Politisi dapil Jawa Barat itu menambahkan, komitmen DPR RI terhadap *Open Parliament* juga harus diikuti dengan penyusunan rencana aksi keterbukaan atau *National Action Plan* (NAP). Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pionir atau negara pertama yang menyusun NAP.

Diketahui, Indonesia bersama 8 negara lainnya merupakan anggota pendiri dari OGP. OGP sendiri adalah sebuah gerakan internasional yang mengusung tujuan keterbukaan pemerintah. Hingga kini, 76 negara telah tergabung dalam OGP.

Rencananya, deklarasi DPR sebagai Parlemen Terbuka akan diselenggarakan bersamaan dengan HUT ke-73 DPR RI pada 29 Agustus 2018 mendatang. ■
[ann,rnm/sf](http://ann.rnm/sf)



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat meninjau Posko Gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pembentukan BRR Untuk Percepat Penanganan Gempa Lombok

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) bertujuan agar ada percepatan penanganan gempa Lombok. Menurutnya, dalam menangani gempa Lombok memerlukan birokrasi *recovery*, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya. Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini, tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja, karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.

“Sekali lagi, ini bencana besar yang diprediksi oleh BMKG, guncangannya itu masih akan terjadi sebulan ke depan. Jadi sekali lagi, saya mengimbau Presiden untuk segera membentuk badan khusus, supaya ini (penanganannya) lebih cepat. Apalagi, yang minta anggaran ini banyak sekali dan itu serius, karena masyarakat belum mau pulang ke rumahnya,” papar Fahri saat meninjau lokasi gempa di Lombok,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (12/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengungkapkan, telah mendapat telpon dari Bupati Lombok Utara yang memohon agar secepatnya dilakukan eksekusi pembentukan BRR, supaya bisa mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar yang membawa alat berat dan lainnya untuk membantu.

“Seperti di rumah sakit yang saya datang ini. Ada dari Jawa Timur, pihak swasta menyumbangkan kamar operasi, tetapi perlu melewati prosedur. Nah tadi saya bilang, ya sudah kita pakai saja, ini kan darurat. Jadi, jangan banyak *cingcong* (banyak omong), sebab akan terlambat,” cetus Fahri saat meninjau RSUD Kota Mataram dan RSUD NTB.

Ditanya soal belum maksimalnya upaya pemerintah setempat, lantas Fahri pun kembali mengatakan tentang perlunya badan khusus tersebut. Sebab sekarang ini, pemerintah setempat tengah mengalami musibah, sehingga tidak mungkin untuk mengandalkan para pejabat lokal untuk mengambil keputusan.

“Kalau pejabat lokal disuruh ambil keputusan, kan repot. Jadi, tidak ada pilihan selain segera membentuk sebuah kelembagaan atau badan khusus, yang dipimpin orang yang tidak terkena



Foto: Dok/Rni



Foto: Andri/Rni

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

DPR Dorong Status Gempa Lombok Ditetapkan Menjadi Bencana Nasional

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan turut berduka atas musibah gempa berkekuatan 6,4 dan 7 Skala Richter yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Peristiwa ini mengakibatkan korban meninggal dunia hingga Senin (13/8), tercatat mencapai 436 jiwa serta lebih dari 1000 rumah mengalami kerusakan.

“Kami atas nama DPR RI mengucapkan belasungkawa kepada saudara kita yang menjadi korban dari gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter di Lombok,” ungkap Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap kejadian yang menimpa Lombok, NTB bisa dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional, mengingat korban yang berjatuhan cukup banyak, serta kerugian yang mencapai triliunan.

“DPR RI akan berusaha meringankan beban saudara kita yang sedang mengalami musibah di NTB. Ini gempa yang cukup hebat dan kuat. Saya ada pemikiran ini dijadikan bencana nasional, sehingga semua bisa gotong royong menyelesaikan masalah ini,” harap politisi dapil Jateng itu.

Salah satu alasan perlu dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional karena kerusakan infrastruktur tidak akan secepatnya bisa diperbaiki apabila menggunakan anggaran yang normal. Jika menggunakan anggaran bencana nasional, tentunya anggarannya bisa diberikan tanpa melalui proses yang administratif, dengan pertanggungjawaban yang *clear*. ■ rnm/sf

bencana. Artinya, dia lebih merdeka, lebih cepat mengkoordinir,” pungkas Fahri.

Anggota Dewan asal NTB ini juga menginginkan agar permintaan berbagai rumah sakit, seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis yang tengah menangani secara rutin para korban gempa bisa segera dipenuhi. Menurut dia, apa yang dihadapi pihak-pihak rumah sakit sekarang sangat kompleks sekali.

Selain itu, masih menurut Fahri, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya jangan terlalu traumatis. Dia pun mengingatkan kembali apa yang terjadi di Aceh dan DI Yogyakarta saat gempa lalu, yang akibat lambatnya penanganan pasca bencana, sebanyak 22 jenis penyakit baru bisa muncul.

“Mulai dari perampokan dan lainnya itu terjadi. Karena itu harus cepat mengeluarkan anggaran kepada birokrasi pemerintahan itu. Soal masyarakat pastilah akan membantu, tapi ini kan yang kita bicarakan non masyarakat, yakni negara. Negara memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya,” tegas Fahri. ■eko/sf

Fadli Zon Imbau Pemerintah Cepat Tanggap Karhutla

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru hingga Sabtu (11/8) sore, mendeteksi adanya 55 titik panas menyebar di tujuh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau. Titik panas tersebut mengindikasikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa harus ada antisipasi secepatnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera mungkin bergerak agar titik panas tersebut dapat dengan cepat diatasi.

“Hal ini harus segera diantisipasi. Pemerintah sebaiknya cepat tanggap mengantisipasi titik panas yang cukup banyak tersebut. Sehingga pengalaman karhutla beberapa tahun lalu tidak terulang kembali,” tuturnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam ini juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan tindakan pencegahan, agar masyarakat yang terkena dampak langsung dapat kembali hidup dengan tenang dan damai.

“Saya kira selanjutnya harus dilakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih penting dan lebih baik untuk kemaslahatan kita semua, terutama masyarakat yang langsung terkena dampaknya,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra tersebut pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menanggapi bahaya tersebut dan menyerahkan segala urusan ini kepada pemerintah.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Foto: Ojji/Rni

“Untuk masyarakat saya harap dapat bersabar. Kita sedang mencegah. Kita terus berharap agar jangan sampai terjadi ya (karhutla). Jadi semua harus tetap tenang dan lanjutkan aktivitas,” pesan Fadli. ■ eps/sf

Fahri Hamzah Targetkan RUU Daerah Kepulauan Segera Selesai



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima draft usulan RUU Daerah Kepulauan dari perwakilan Anggota DPD RI dan para Kepala Daerah Kepulauan

Foto: Andri/Rni

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima perwakilan Anggota DPD RI dan para Kepala Daerah Kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka meminta kepada DPR RI agar fokus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Menanggapi permintaan tersebut, Fahri menargetkan RUU Daerah Kepulauan bisa segera selesai sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 selesai.

Keamanan Kompleks Parlemen Harus Diperhatikan

Keamanan Kompleks Parlemen sebagai rumah rakyat harus mendapat perhatian serius. Walau ini diklaim sebagai rumah rakyat, tapi tidak boleh sembarangan orang masuk begitu saja tanpa pantauan pengamanan yang memadai. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menekankan sistem keamanan harus terbangun dengan baik.



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto

“Konsen utama saya pada keamanan gedung ini. Oke ini adalah rumah rakyat, tapi sistem keamanannya harus dipastikan dengan baik. Terbukti, kemarin di bulan Mei atau Juni ada mahasiswa yang ditangkap karena akan melakukan pengeboman terhadap DPR,” ungkapnya kepada Parlemen, di ruang kerjanya, Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Menurut Utut, bila Presiden mendapat pengawasan Paspampres, maka di Kompleks Parlemen juga harus mendapat pengamanan dari Polri. Misalnya, komandan pengamanan harus berpangkat mayor jenderal polisi. Sementara, peran Pengamanan Dalam (Pamdal) tetap ada sebagai personel pengamanan di dalam gedung. Ini semua diperlukan untuk kenyamanan para anggota dewan saat bekerja dan kenyamanan pula bagi para tamu parlemen.

Selain sistem keamanan yang memadai, sistem komputerisasi juga harus mampu mengakses semua aktifitas para Anggota Dewan. Dari kehadiran, rapat-rapat Komisi, capaian Prolegnas, dan lain-lain semuanya terintegrasi secara memadai.

“DPR harus punya sistem komputerisasi yang merekap segala hal. Kehadiran anggota, aktifitas Komisi, pencapaian Prolegnas yang semuanya terintegrasi dalam suatu sistem komputerisasi. Akuntabilitas tanpa adanya dukungan dari teknologi, akan sulit tercapai,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Pada bagian lain, ia menambahkan soal pembangunan gedung yang sudah mendesak dibangun di Kompleks Parlemen. Persoalan ini selalu jadi sorotan publik. Anggaran untuk pembangunan gedung baru sebetulnya ini sudah disetujui. Namun, polemik pembangunan gedung selalu ramai setiap kali DPR RI ingin menambah membangun gedung baru.

“Sampai sekarang masih belum berjalan. Padahal, Menkeu sudah setuju. Namun, kabarnya izin prinsip pembangunan gedung belum dikeluarkan Presiden,” ungkap Pimpinan DPR RI yang membidangi BAKN dan BURT ini. ■ mh/sf

Foto Jaka/Rni

“Kalau bisa sebelum pergantian tahun ini. Tapi kita tahun ini tahun politik, dan mulai akan ada kampanye. Dan karenanya, saya kira ini relatif tertunda. Berharap setelah April pencoblosan Pemilu, (pembahasan) *ngebutlah*,” papar Fahri di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/8).

Menurutnya, ada satu variabel yang perlu disepakati, yakni berkaitan dengan alokasi anggaran khusus bagi daerah-daerah kepulauan. Menurutnya, jika penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan disamakan dengan daerah tidak kepulauan dan berdasar pada luas tanah, maka cara tersebut tidak proporsional. Karena di daerah kepulauan yang luas adalah lautnya, bukan daratan.

“Yang luas itu lautnya. Pulau kecil-pulau kecil, tapi lautnya luas. Sementara di daerah kepulauan alat transportasinya tidak biasa. Belum lagi rintangan transportasi di laut ada ombak dan sebagainya. Harus masuk di dalam hitungan, dan itu mencangkup,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Ada satu variabel yang perlu disepakati, yakni berkaitan dengan alokasi anggaran khusus bagi daerah-daerah kepulauan

Fahri menegaskan, jika pemerintah menyadari, sebenarnya RUU ini menjadi peletakan dasar konsepsi awal bagaimana mengelola maritim di Nusantara. Dia juga mengatakan, persaingan peradaban di dunia sudah dikuasai oleh negara-negara berbasis darat yang luas. Maka, jika Indonesia ingin membangun dan bersaing dengan peradaban yang sudah besar, harus mengutamakan konsepsi maritim.

“Di darat ini kita terlalu banyak saingan. Peradaban besar yang ada sekarang adalah peradaban darat, semua China, Amerika. Itu semua peradaban darat. Peradaban laut itu kita. Kalau kita mau bersaing, lawan dengan konsepsi maritim,” tandas politisi dapil NTB itu. ■

eko/sf

Pemerintah Harus Kawal Pembebasan Bea Masuk Produk Palestina

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang membuka pintu seluas-luasnya terhadap produk asal Palestina tanpa dikenakan tarif bea masuk atau 0 persen. Namun ia mengingatkan, pemerintah untuk mengawal dan memastikan tidak ada produk-produk Israel yang ikut serta dalam kebijakan pembebasan bea masuk bagi produk Palestina itu.



Foto: Rumi/Rni

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

“Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Palestina. Namun di sisi lain, pemerintah harus mengawal dan memastikan, produk tersebut asli dari

Palestina. Jangan sampai produk Israel ikut masuk Indonesia, karena selama ini produk dari Palestina yang keluar, harus melewati Israel,” tegas Taufik dalam rilis pers yang diterima Parlemen, Selasa (14/8).

Selain kurma dan minyak zaitun murni, politisi PAN itu juga mendorong supaya produk lain yang berasal dari Palestina mendapat perjanjian zero tarif khusus itu. Hal ini dimaksudkan agar produk-produk yang berpotensi masuk ke Indonesia, dapat ditingkatkan. Selain dapat meningkatkan perekonomian Palestina, saat ini jumlah ekspor Indonesia jauh lebih banyak ke Palestina dibandingkan sebaliknya, padahal negara tersebut tengah mengalami kesulitan.

“Kita mendorong ini bukan hanya sebagai dukungan politik, namun juga bentuk dukungan nyata Indonesia terhadap Palestina. Selain itu, kita juga mengekspor produk Indonesia yang benar-benar dibutuhkan Palestina. Namun dari kerja sama ini yang menjadi perhatian, jangan sampai produk Israel ikut terbawa ke Indonesia,” tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.

Diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Jakarta pekan lalu menandatangani pengaturan pelaksanaan atau Implementing Arrangement (IA) pada Nota Kesepahaman (MoU) tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0 persen terhadap dua produk Palestina. Dua produk yang sudah masuk dalam kesepakatan adalah kurma dan minyak zaitun murni.■
es/sf

Pengelolaan Air Bersih Harus Dilakukan Dengan Baik

Krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menambah beban penderitaan bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah yang mengalami krisis tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa pengelolaan air harus diatur dengan baik, tidak boleh dilakukan secara sesukanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

“Pengelolaan air harus dikelola dengan baik dan seksama. Sebab di dalam UUD 1945 dikatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sehingga ke depan tidak boleh ada perorangan

atau badan usaha mengambil air dengan sesukanya,” tegas Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Perindustrian dan Pembangunan itu, persoalan pengelolaan air ini harus diatur dengan sebaik-baiknya.

Persediaan cadangan air harus dikuatkan dengan memperbanyak pembuatan embung-embung dan resapan-resapan. Dikatakannya, hutan harus tetap mempunyai kandungan air yang tinggi, agar pada saat musim kemarau kita masih memiliki cadangan air bersih.

BAKN Bisa Jembatani Dana Desa

Dana Desa yang kerap bermasalah, karena aparat desa yang belum mampu mengelola dan membuat laporan pertanggungjawabannya, harus terus dipantau. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI harus mampu menjembatani masalah tersebut. Uang negara yang telah didistribusikan ke daerah harus pula dikelola dengan baik.



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto

RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, ke depan BAKN akan didorong untuk memformulasikan bentuk pengawasan dan pelaporan yang lebih mudah. Sistem harus dibangun agar memudahkan akses pengguna anggaran baik di pusat maupun daerah. Dengan begitu, anggaran yang didistribusikan pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sejauh ini, sambung Utut, peran BAKN lebih kepada pengawasan yang bersifat substantif, bukan pengawasan di ranah pidana atau hukum. "BAKN memiliki kode etik, apa-apa saja yang bisa dilaporkan. Kalau ini berhasil, pasti APBN akan menjadi stimulus yang dahsyat dan berujung pada kemanfaatan anggaran bagi masyarakat," imbuhnya lagi.

Bila dibandingkan dengan wilayah kerja KPK yang mampu mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara, maka BAKN justru menstimulus anggaran yang sudah disahkan bagi perekonomian nasional. Di sinilah pentingnya keberadaan BAKN. Mitra kerja utama BAKN adalah BPK. Semua laporan BPK ditelaah kembali oleh BAKN.

"Setiap rupiah yang digelontorkan harus terkonfirmasi penggunaannya dengan baik," tutup politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ mh/sf

BAKN bisa menjembatani berbagai pelaporan seperti Dana Desa yang *njelimet* menjadi lebih mudah. Bukan berarti mengampangkan,

tetapi membuat semua menjadi lebih baik. *Do and done*-nya menjadi lebih jelas," ujar Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di ruang kerjanya, Gedung DPR



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Persediaan cadangan air harus dikuatkan dengan memperbanyak pembuatan embung-embung dan resapan-resapan.

"Manajemen air harus dikelola dengan baik, begitu pula dengan masalah pengairan harus diciptakan dengan baik. Sehingga dengan pengairan yang baik itu, kita tetap bisa mengalirkan air ke sawah-sawah guna memperkuat pertanian, dan juga bisa memberikan tenaga listrik yang mencukupi," pungkas politisi Partai Demokrat itu. ■ dep/sf

Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON 2020



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Stadion Papua Bangkit

Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi menilai Provinsi Papua sudah siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada tahun 2020. Menurutnya, sejumlah persiapan telah mulai dilakukan, terutama aspek infrastruktur dan akses menuju lokasi.

Demikian diungkapkannya usai meninjau sejumlah pembangunan sarana dan prasarana PON, diantaranya Stadion Istora Papua Bangkit dan Jembatan Holtekamp di Jayapura dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis ke Papua, baru-baru ini.

“Saya kira Papua sudah siap, dari sisi desain dan konstruksi sangat luar biasa. Stadion ini akan menjadi salah satu terindah di Indonesia, karena dikelilingi perbukitan yang luar biasa. Tidak ada lingkungan secantik Jayapura ini,” kata Henky.

Agar bisa memastikan kelancaran saat menjadi tuan rumah pesta olahraga empat tahunan tersebut, ia juga mengingatkan agar pemerintah setempat memperhatikan tata letak sejumlah sarpras *venue* serta menerapkan strategi kanalisasi.

“Layout sangat penting, jangan sampai uang triliunan rupiah untuk pembangunan, tetapi perencanaannya kurang matang dan menjadi masalah di kemudian hari,” ingat politisi PDI Perjuangan itu.

Sistem kanalisasi, lanjut Henky, nantinya dapat mencegah timbulnya kemacetan di sekitar *venue*. “Perlu diingat *stakeholder* olahraga bukan hanya atlet, tetapi juga penonton. Ketika ada *event* besar, yang datang berbondong-

bondong adalah penonton, sehingga harus ada kanalisasi, seperti kafe-kafe untuk rileks,” imbuh politisi dapil Jatim itu.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka optimis tahap pembangunan infrastruktur penunjang PON 2020, seperti Jembatan Holtekamp akan rampung sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Mengingat, beberapa sarana pendukung PON masih terkendala pembebasan lahan.

“Dengan adanya Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON di Papua, saya berharap masyarakat setempat mendukung, sehingga pengerjaan berjalan lancar. Kita harap masalah pembebasan lahan ini cepat selesai, jangan sampai status kawasan menjadi penghambat,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, selain memperlancar konektivitas, Jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kota Jayapura dengan distrik Muara



Foto: Anne | OD

RUU Daerah Kepulauan Diharap Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Pulau

Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends mengharapkan adanya perlakuan yang adil bagi daerah-daerah kepulauan. Dia menjabarkan, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Keuangan Pusat dan Daerah, perhitungan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) hanya berdasar pada luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Kalau aturan tersebut berlaku juga pada daerah kepulauan yang kondisi geografisnya lebih luas laut, maka terjadilah ketidakadilan pembagian anggaran.



Foto: Andri | OD

Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends

Tami sebagai tempat pembangunan Wisma Atlet ini akan mendorong pengembangan di kawasan perbatasan Skouw.

“Kita berharap pintu masuk PNG-Papua ini menjadi spot wisata air dan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pembangunan di Papua tidak hanya sekedar fisik, tetapi memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal,” tutup politisi dapil Kalteng itu.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sementara membangun beberapa *venue* PON XX di dua lokasi, yakni Harapan dan Doyo Baru. *Venue* Aquatik dan Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan, sementara Lapangan Kriket dan Lapangan Hoki Indoor dan Outdoor di Doyo Baru. Ditargetkan ke-4 *venue* tersebut rampung pada Maret 2020. ■ ann/sf

RUU Daerah Kepulauan ini diperjuangkan DPR RI untuk mempercepat seluruh proses pembangunan. Karena di daerah-daerah kepulauan terjadi *gap*, disparitas yang sangat tinggi antara daerah kontinental dengan daerah kepulauan. Lima ranking termiskin di antaranya ini provinsi-provinsi kepulauan semua,” papar Mercy usai rapat dengan perwakilan Anggota DPD RI dan para Kepala Daerah Kepulauan seperti Riau, Maluku, dan NTT, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (10/8).

Menurut Anggota Dewan dari dapil Maluku ini, daerahnya merupakan satu dari delapan provinsi yang menggagas lahirnya RUU Daerah Kepulauan. Dia mengungkapkan, setiap daerah kepulauan memiliki luas rata-rata daratan di bawah 10 persen dari luas seluruh wilayah, kecuali Bangka Belitung. Maluku sendiri memiliki luas laut 92 persen, sisanya sekitar 6,7 persen darat.

la menilai, jika dalam aturan hanya darat saja yang dihitung sebagai wilayah pemerintahan sedang lautan tidak masuk

hitungan, maka ini tidak proporsional. Untuk itu, menurutnya RUU ini harus dipandang setara dengan UU Otonomi Khusus seperti Papua, Aceh dan lainnya.

“Karena kita punya kekhususan, yaitu daerah kepulauan. Yang dari sisi tata kelola lautan yang harus dihitung sebagai wilayah layanan pemerintah dan layanan pembangunan. Ini yang harus dimengerti juga oleh pemerintah pusat,” jelas Mercy menambahkan.

Dia menegaskan kembali pada asas keadilan anggaran, yang menjadi harapan daerah kepulauan adalah, RUU ini menjadi afirmasi kebijakan yang mendorong asas keadilan anggaran. Selain itu, juga mendorong percepatan pembangunan daerah kepulauan, yang masih dikategorikan daerah terpencil dan terisolir di wilayah perbatasan.

“Juga untuk mempercepat provinsi-provinsi kepulauan yang miskin untuk bisa bergeliat dan setara dengan daerah-daerah yang lain. Jangan ada diskriminasi negatif,” tandas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. ■ eko/sf

Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di TN Komodo

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu.

Terkait adanya proyek pembangunan itu, Tim Kunker Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik akan mengkaji secara mendalam, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut.

“Saat ini Komisi III sedang berada di areal lokasi pembangunan yang dibangun oleh pihak swasta di Taman Nasional Komodo. Kehadiran kita karena adanya laporan dari masyarakat tentang rencana pembangunan di areal ini. Oleh karenanya kami akan kaji, apakah pembangunan ini melanggar hukum atau tidak. Sebab setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Yosef B Badeoda (F-PD) di Pulau Rinca, NTT, baru-baru ini.

Mengutip tulisan pada papan informasi yang terpasang di titik lokasi proyek pembangunan, Yosef menyampaikan bahwa disitu tertulis pemberi izinnya adalah dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. “Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. “Karena (areal itu) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Senada dengan dua rekannya, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub memaparkan bahwa jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 hektar. “Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini.

Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu.

Menanggapi kejadian yang ada, Kapolres Manggarai Barat menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak TN Komodo untuk mendapatkan konfirmasi tentang kegiatan yang dilakukan di TN Komodo itu, khususnya yang ada di Pulau Rinca. “Mungkin dari sana nantinya kami akan mendapatkan penjelasan tentang aturan atau regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan di dalam areal Taman Nasional Komodo,” jelasnya. ■ apr/sf



Tim Kunker Komisi III DPR RI saat sidak proyek pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo

Ermalena Tekankan Pentingnya Pemulihan Pasca Gempa

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menekankan pentingnya mempersiapkan pemulihan kondisi pasca gempa. Dia mengungkapkan, rasa trauma pada masyarakat yang terdampak gempa pasti menjangkit.

Oleh sebab itu, tegas Ermalena, rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan dalam semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca gempa penting dilakukan, terlebih lagi pemulihan kondisi medis pada korban.

“Ini pasti akan membawa dampak tersendiri. Oleh karena itu, kesiapan tenaga medis sudah harus mempersiapkan pasca gempa,” papar Erma, sapaan akrabnya, dalam sambutan langsung dari Lombok melalui telepon kepada Parlemen, Kamis (09/8).

Anggota Dewan dari dapil Nusa Tenggara Barat itu juga melaporkan telah terjadi gempa lagi di Lombok, NTB, pada sekitar Kamis (09/8) pukul 12.30 WITA, dengan kekuatan 6,2 skala Richter (SR). Untuk itu, saat ini koordinasi terus dilakukan untuk mengatasi dampak dari kerusakan yang diakibatkan gempa.

Berkaitan dengan penanganan kesehatan, menurut Erma, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Menurut pengawasannya, seluruh Puskesmas di Lombok Barat yang berdampak gempa tetap melakukan pelayanan di Puskesmas, walaupun tidak

di dalam gedung. Karena rata-rata gedung Puskesmas mengalami rusak.

“Kalau kesehatan sampai saat ini bisa diatasi dengan baik. Karena seluruh petugas tenaga kesehatan turun, *volunteer* banyak sekali. Penanganan kesehatan berjalan dengan baik. Sampai tadi pagi semua berjalan dengan baik,” jelas politisi PPP itu.

Berkaitan dengan distribusi logistik kebutuhan para korban gempa hanya terkendala pada sulitnya akses, karena sarana umum seperti jalan yang rusak. “Masalah yang kedua yang berhubungan dengan logistik. Logistik memang partisipasi masyarakat luar biasa, tapi karena gempa ini massal, logistik ada masalah, dan tidak bisa memenuhi dalam waktu pendek seluruh kebutuhan masyarakat. Tapi sudah mulai berjalan,” papar Erma. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meninjau korban gempa Lombok.

Gerakan Pramuka Sebagai Wadah Pembentukan Karakter

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta Gerakan Pramuka tetap dijadikan sebagai wadah generasi muda dalam membina akhlak, budi pekerti, watak, dan perilaku. Untuk itu, tepat di Hari Ulang Tahun ke 57 Gerakan Pramuka ini, Sutan berharap Gerakan Pramuka bisa terus ditingkatkan untuk mengasah keterampilan, inovasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Agar generasi kita kini dan mendatang memiliki daya saing yang tinggi.

Gerakan Pramuka harus terus dipupuk sebagai wadah bagi pembentukan nasionalisme dan patriotisme, dan sebagai wadah pengendalian diri dari pengaruh-pengaruh negatif dan buruk agar generasi dan tunas-tunas bangsa tumbuh secara cemerlang,” kata Sutan dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (14/8).

Lebih lanjut ia mengatakan, pendidikan

kepramukaan tidak boleh tergerus oleh zaman dan tetap berperan besar dalam mencetak generasi muda yang unggul, berakhlak, berilmu, berbudi pekerti, dan mencintai alam. Gerakan Pramuka ditujukan untuk menjadi instrumen yang dibutuhkan para siswa, orang tua, sekolah, dan lingkungan sebagai tempat yang menyenangkan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat generasi muda secara positif.

“Mari jadikan kepramukaan sebagai tempat belajar berorganisasi, bergotong royong, memupuk persaudaraan, dan membina kerukunan antar sesama,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Dalam perayaan Gerakan Pramuka tahun ini, Sutan mengajak warga turut serta menjadikan Gerakan Kepramukaan sebagai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan di masa depan.

“Kita semua memiliki tekad yang sama. Kita tidak ingin Gerakan Pramuka melemah aktivitasnya, kurang bersemangat, dan berjalan seadanya,” harap Sutan.

Ia menilai perlu langkah bersama agar Gerakan Pramuka menjadi kebutuhan

Asian Games Menjadi Soft Diplomacy Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien menyampaikan, soft diplomasi Indonesia dengan digelar Asian Games 2018 dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari segi atlet, infrastruktur, kebudayaan, pelayanan, dan pariwisata. Hal itu diungkapkannya pada acara bedah buku tentang ‘Meningkatkan Wibawa Indonesia di ASEAN Melalui Soft Diplomasi Indonesia dan Penyelenggaraan Asian Games 2018’.



Foto: Oditie | OD

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien pada acara bedah buku tentang ‘Meningkatkan Wibawa Indonesia di ASEAN Melalui Soft Diplomasi Indonesia dan Penyelenggaraan Asian Games 2018’.

Dari segi atlet, penyelenggaraan Asian Games 2018 dapat menjadi ajang unjuk gigi atlet Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara luar. Sedangkan dari segi infrastruktur,

menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang gencar melakukan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian Indonesia dapat menunjukan kepada negara lain bahwa kita siap dan matang

untuk menggelar acara ini,” jelas Hetifah yang didaulat sebagai pembicara dalam acara bedah buku yang digelar di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (08/8).

Dari segi kebudayaan, lanjutnya, pada sesi *Opening* dan *Closing* Asian Games 2018 akan disuguhkan acara yang megah dengan melibatkan ribuan penari dan tata panggung yang menunjukkan ciri khas Indonesia. Menurut Hetifah, hal itu akan menjadi *soft diplomacy* Indonesia kepada negara lain, yakni dimana Indonesia dapat menunjukkan bahwa dengan segala perbedaan yang ada dalam budaya Indonesia semua saling membantu mewujudkan kesuksesan Asian Games 2018.

“Sementara dari segi pelayanan, keramahan orang Indonesia dan juga menu makanan yang disajikan akan membawa kesan baik bagi negara lain setelah Asian Games 2018. Begitu juga dari segi pariwisata, Asian Games 2018 akan memberikan *impact* terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan. “Hal ini bisa dimanfaatkan juga untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia,” ucap Hetifah.

Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, jika dikaitkan dengan konstitusi dan tugasnya di DPR, maka sesuai dengan amanat konstitusi didalam alinea ke empat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Jadi konteks dan sejarahnya jelas.

bagi pengembangan nilai-nilai mulia seperti terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka yang sangat tinggi makna filosofinya sekaligus memiliki nilai keteladanan luhur.

“Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa Gerakan Pramuka itu sangat penting bahkan dalam situasi dan perkembangan zaman dewasa ini, pendidikan kepramukaan sangat strategis dan diperlukan oleh bangsa kita,” dorong politisi dapil Jambi itu. ■ rnm/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

Foto: Ootjeil OD

Kita ditunjuk sebagai penyelenggara Asian Games menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri. Sidang umum Dewan Olahraga Asia kemudian menunjuk Indonesia. Penunjukkan oleh Dewan Olahraga Asia tersebut bukan sembarang saja, tetapi dengan berbagai pertimbangan, yaitu Indonesia dianggap memiliki stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga, serta tren pertumbuhan ekonomi kita yang positif. *Venue* yang ada juga dianggap sudah memenuhi kriteria,” paparnya.

Dikatakannya, Asian Games 2018 akan diikuti oleh 45 negara, lebih dari 17 ribu atlet dan *official*, dan juga 7 ribu media yang terlibat dalam peliputan. Diharapkan ada 5 miliar penonton dari berbagai negara yang bukan hanya dari Asia tetapi seluruh dunia. Terhadap target prestasi, Indonesia diharapkan mampu mencapai peringkat 7 sampai 10 besar.

“Kita mempersiapkan (pelaksanaan Asian Games 2018) ini kurang dari 3 tahun. Seharusnya Asian Games ke XVIII ini dilangsungkan pada tahun 2019, namun karena Indonesia melangsungkan Pemilu di tahun 2019, maka dimajukan menjadi tahun 2018. Kita sudah berusaha maksimal. Kami di DPR selalu menegaskan kepada mitra kami, baik Inasgoc maupun kementerian terkait bahwa sukses yang harus diraih bukan hanya sukses prestasi dan penyelenggaraan saja, tetapi juga sukses ekonomi dan sukses administrasi,” pungkasnya. ■ dep/sf

Ekonomi Kuartal II Kian Jauh Dari Target

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 ini yang hanya sebesar 5,27 persen, masih jauh dari target pemerintah sebesar 5,4 persen. Pemerintah sendiri mengklaim ini merupakan capaian tertinggi. Padahal, janji kampanye Presiden Joko Widodo disebutkan mencapai 7 persen. Sudah empat tahun pemerintahan berjalan, target pertumbuhan tak pernah tercapai.

“ Saya melihat faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah berakhirnya *booming* komoditas yang menjadi mimpi buruk bagi perekonomian nasional. Faktanya, saat fase *booming* komoditas, pertumbuhan ekonomi dari 2015-2016 menunjukkan performa yang jauh dari harapan. Pada kuartal II 2015, misalnya, pertumbuhan hanya sebesar 4,74 persen,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat diwawancara lewat sambungan telepon, Kamis (09/8).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, sejak kuartal I 2016, pertumbuhan ekonomi bergeser ke angka 4,94 persen, meski kurang begitu memuaskan. Tahun 2016 itu adalah fase *recovery* pasca berakhirnya *booming* komoditas, sampai akhirnya pada kuartal II 2018 naik ke angka 5,27 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2018, nampaknya lebih dipengaruhi belanja bantuan sosial (*bansos*).

Program ini, kata Heri, turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, pada sisi lain berimbas pada pengurangan belanja modal pemerintah. “Kebijakan belanja *bansos* yang besar itu memang *by design*, tentunya seiring semakin dekatnya tahun politik jelang Pilpres 2019. Kebijakan ini mengorbankan belanja modal yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor strategis nasional, seperti pangan dan energi. Ini terlihat dari kontribusi *government expenditure* yang kecil sekali dampaknya terhadap peningkatan sektor produktif,” papar Heri.

Naiknya konsumsi rumah tangga saat ini, sambung politisi dari dapil Jabar IV itu, tidak berarti daya beli masyarakat membaik. Semuanya dilatari kontribusi belanja pemerintah (*government expenditure*). Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat, khususnya bantuan sosial. Jadi secara keseluruhan, perekonomian nasional selama pemerintahan ini benar-benar bergantung faktor eksternal, bukan hidupnya ekonomi riil.

Heri menilai, seringnya target pertumbuhan pemerintah meleset, karena proyeksi yang dibuat sering *over optimistic*. Itu menjadi tanda bahwa pemerintah tidak membaca keadaan lapangan, apa yang sebetulnya terjadi. “Angka ketimpangan yang masih bertengger di kisaran 0,39, mestinya sudah lebih dari cukup untuk menjadi warning bahwa arah kebijakan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi keliru. Sistem ekonomi yang dijalankan selama ini juga belum mampu menciptakan pemerataan secara total,” tandasnya lagi.

Ditambahkannya, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun masih tak bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat banyak. Ekonomi nasional pun tidak dinikmati rakyat banyak. Bahkan, angka di kuartal II sebesar 5,27 persen itupun hanya bersifat sementara, belum mampu merembes sampai ke kelas masyarakat menengah ke bawah yang proporsinya sebesar 80 persen. ■ mh/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Foto: Gerardi | OD



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada acara peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Foto: Andri | OD

Sekjen DPR Tekad Bangun Tradisi Intelektual di Kompleks Parlemen

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bertekad membangun tradisi intelektual di Kompleks Parlemen. Mengingat DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang cukup penting dalam merumuskan sebuah Undang-Undang (UU). Karenanya tradisi intelektual haruslah melekat dalam DPR RI.

Indra mengatakan, jika tradisi intelektual di DPR RI dapat terbangun melalui ruang diskusi publik, maka niscaya DPR RI akan semakin dipercaya rakyat dalam menghasilkan produk UU yang dibutuhkan masyarakat.

Demikian disampaikan Indra saat menyampaikan sambutan di acara peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang bertajuk 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera?' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

"Ini forum akademis, meski

disampaikan oleh Bapak Fahri Hamzah, tokoh politik muda yang cukup dikenal. Kami dari Kesetjengan menyambut baik gagasan ini. Apa yang dirintis Bapak Fahri Hamzah adalah bagian dari obsesi kami di Kesetjengan. Bahwa tradisi intelektual kritis harus dibangun di Kompleks Parlemen," ungkap Indra.

Membangun tradisi intelektual ini, lanjut Indra adalah bagian dari upaya menjadi NKRI secara baik. Hal ini yang menurutnya akan terus dilakukan. Kegiatan seperti forum-forum diskusi ataupun konferensi internasional akan

dilakukan, guna menjaga tradisi intelektual di DPR RI.

"Gagasan ke depan adalah tentang bagaimana menjaga NKRI secara baik. Ke depan akan ada pertemuan World Parliamentary Forum di Bali dan dilanjutkan pertemuan parlemen negara MIKTA. Pertemuan itu bagian dari keinginan parlemen kita untuk aktif di kawasan," sambung Indra.

Indra meyakini, jika kegiatan intelektual terus dilakukan secara rutin, maka langkah mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern akan semakin cepat terealisasi.

Turut hadir dalam peluncuran buku ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Sementara buku dibedah oleh Fuad Bawazier dan Rokhim Dahuri. ■ hs/sf



Foto: Gerai1100

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima audiensi DPRD Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Rencana Bentuk Pansus PAD, DPRD Solok Konsultasi ke DPR

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan perlu pertimbangan matang dalam membentuk sebuah panitia khusus (pansus). Terlebih lagi berkaitan dengan pajak yang merupakan isu sensitif.

Hal itu dikatakan Johnson saat menerima audiensi DPRD Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka konsultasi tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan wawasan pansus tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (2/8).

“Perlu kehati-hatian, lihat Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak karena berbagai hal harus dipelajari. Jangan sampai nanti dibentuk, pansusnya mendapat kritik dari masyarakat,” kata Johnson.

Untuk diketahui Solok merupakan kota kecil di Sumatera Barat dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang terbatas. Namun pemerintah setempat berupaya memaksimalkan potensi yang ada guna meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Dalam pertemuan tersebut

mengemuka rencana pembentukan pansus PAD dalam rangka upaya percepatan pembangunan di Solok.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan Pusat Kajian Anggaran BK DPR, hal ini akan bermuara pada persoalan manajemen keuangan daerah secara umum. Sebab PAD merupakan pemenuhan kebutuhan keuangan daerah. Sehingga perlu dikaji dulu apakah kebutuhan anggaran dengan kapasitas anggarannya seimbang atau tidak seimbang, apakah kebutuhan anggaran ini sudah mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan Solok, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari anggaran daerah sendiri.

“Kemudian kita lihat respon publik terhadap pelayanan di Solok. Terutama kita kaitkan dengan masalah PAD ini,

apakah di sana ini ketaatan membayar pajak atau retribusi ini rendah atau tidak. Perlu diperhatikan sebelum membentuk pansus. Apa yang mau digali di pansus tersebut. Biasanya kan ketika membentuk pansus bukan mengkorek-korek masalah, tapi mencari persoalan sebenarnya di PAD kondisinya seperti apa,” lanjut Johnson.

Persoalan yang sering terjadi menurut Johnson adalah ketika anggaran kebutuhan yang tinggi, di satu sisi pendapatan rendah dan persoalan dari rendahnya ketaatan wajib pajak. Faktor lain penyebab rendahnya pendapatan daerah

adalah lemahnya infrastruktur dan SDM. Ia menekankan pansus yang dibentuk harus bisa mendalami potensi yang dapat dikembangkan di kota Solok. Jangan sampai pansus merekomendasikan sesuatu yang tidak berkaitan.

Untuk itu, Johnson meminta agar melakukan kajian lebih lanjut sebelum membentuk pansus selain menghindari kritik dari masyarakat, agar juga mengetahui sejauh mana kewenangan dari pansus ini bekerja secara hukum diranah DPRD.

Dalam kesempatan itu, diakui Wakil Ketua DPRD Kota Solok Iman Yefri Adang, bahwa Solok merupakan kota kecil dengan potensi SDA terbatas, namun ada beberapa bidang yang dapat di kembangkan. Sehingga ia yakin dapat meningkatkan PAD dan pembangunan di daerahnya.

“Pansus ini kami laksanakan berkaitan dengan ketidaksesuaian pendapatan dari potensi-potensi yang ada itu penilaian kami di daerah, bahkan pendapatan ini ada sebagian bidang ada yang menurun. Sementara yang kami nilai ini seharusnya mengalami peningkatan. Saya harap masukan dari DPR dapat dijadikan rekomendasi, sandingan bagi kami untuk bisa maksimal untuk menyelesaikan pansus ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Yefri.

■ apr/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin rapat evaluasi KemenPAN-RB atas Pelaksanaan RB dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BK DPR RI

Evaluasi Pelaksanaan RB Diharapkan Perbaiki Kinerja Setjen DPR

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha berharap pelaksanaan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 diharapkan mampu menghasilkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI yang lebih baik. Evaluasi tersebut nantinya ditunjukkan melalui pemenuhan evidence atau bukti-bukti yang menunjukkan adanya suatu proses dari perbaikan kinerja di Setjen dan BK DPR RI.

“Evidence yang dimaksud misalnya dapat berbentuk seperti peraturan baru yang memungkinkan peningkatan kinerja, sistem yang membangun kinerja agar lebih baik, serta evidence yang berkaitan dengan

adanya inovasi dalam rangka pelayanan terhadap publik. Hal-hal itulah yang diharapkan dari KemenPAN-RB dalam hal evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi mampu menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik,” jelas

Totok, sapaan akrab Setyanta, usai rapat evaluasi KemenPAN-RB atas Pelaksanaan RB dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (13/8).



Foto: Rumi | OD

Nantinya KemenPAN-RB akan memvalidasi seluruh dokumen dan evidence yang disampaikan termasuk bukti-bukti. Nantinya bukti-bukti tersebut akan bermuara pada penentuan terhadap nilai dari penilaian mandiri terhadap pelaksanaan RB yang telah dilakukan, apakah perolehan nilai yang sudah didapat akan pada posisi tetap, turun, atau bahkan meningkat

Untuk mensukseskan evaluasi RB tersebut, Totok mengungkapkan telah terbentuk role model, yakni Agen Perubahan terhadap 25 Kepala Bagian yang diharapkan mampu melakukan perubahan atau menularkan perubahan di area masing-masing, maupun area yang lebih luas lagi dan berujung pada peningkatan kinerja.

“Oleh karena itu, motivasi yang dibangun di dalam RB ini adalah suatu perbaikan dan peningkatan kinerja menjadi suatu sistem. Apabila sistem tersebut memenuhi persyaratan untuk diajukan usulan peningkatan kinerja maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyiapan terhadap infrastruktur dan evidence serta anggaran untuk peningkatan tunjangan kinerja,” ungkap Totok.

Lebih lanjut Totok menambahkan, rapat ini merupakan pertemuan pendahuluan yang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada 21 Agustus 2018. Nantinya para penanggung jawab di masing-masing Area Perubahan akan menyajikan data dan informasi serta evidence terkait terhadap pelaksanaan di 8 Area Perubahan.

“Nantinya KemenPAN-RB akan memvalidasi seluruh dokumen dan evidence yang disampaikan termasuk bukti-bukti. Nantinya bukti-bukti tersebut akan bermuara pada penentuan terhadap nilai dari penilaian mandiri terhadap pelaksanaan RB yang telah dilakukan, apakah perolehan nilai yang sudah didapat akan pada posisi tetap, turun, atau bahkan meningkat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam sambutannya menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, kaitannya dengan implementasi RB, maupun penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP).

“Diantaranya adalah, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut, kepatuhan pengisian LHKPN dan LHKASN, penetapan Persekjen tentang gratifikasi, serta peningkatan klinik konsultasi untuk meningkatkan peran konsultasi di seluruh unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI,” jelas Indra.

Indra turut melaporkan dari hasil evaluasi atas implementasi RB dan

SAKIP di Setjen dan BK DPR RI dalam 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. “Berdasarkan hasil evaluasi RB, pada tahun 2017 Setjen dan BK DPR RI mendapat nilai 71,05 naik 4,83 poin dari tahun 2016 yang hanya sebesar 66,22. Sementara nilai SAKIP Setjen dan BK DPR RI juga mengalami peningkatan yang sebelumnya di tahun 2016 mendapat nilai 55,13 pada tahun 2017 naik menjadi 60,31 dan menjadi kategori B,” ungkapnya.

Meski dari hasil evaluasi tersebut dikategorikan membanggakan, Indra menyampaikan seluruh jajaran Setjen dan BK DPR RI selalu berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan hasil evaluasi di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang.

“Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, saya mengharapkan agar seluruh komponen yang terkait baik itu dari unsur tim kerja accessor, asisten accessor, penanggung jawab area unit kerja maupun staf terkait untuk dapat meluangkan waktu dan menyiapkan dokumen serta evidence yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi ini,” harap Indra.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III KemenPAN-RB Naptalina Sipayung menyampaikan tujuan evaluasi yang ingin diperoleh terkait kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan RB di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

“Yakni diantaranya untuk memperoleh informasi atau hal-hal yang sudah baik dan belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan. Kemudian memperoleh informasi dan hal-hal yang sudah baik untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dari periode sebelumnya,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan dibuat profil instansi dalam pelaksanaan RB dalam rangka kebutuhan pembelajaran antar instansi. “Misalnya nantinya seperti apa posisi Setjen dan BK DPR RI jika dibandingkan dengan kementerian dan instansi-instansi lainnya,” ungkapnya. ■ tra/sf

Setjen DPR Apresiasi Pelayanan Publik Terintegrasi Banyuwangi

Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mohammad Djazuli mengapresiasi adanya Ruang Pelayanan Publik di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa menjadi acuan bagi daerah yang lain, termasuk DPR RI dalam memberikan pelayanan ke Anggota DPR RI juga masyarakat.



Foto: Rihyan | OD

Kabag Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Mohammad Djazuli memimpin Tim *Benchmarking* Sub Bagian Media Sosial DPR RI mengunjungi Ruang Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi

Demikian diungkapkan Djazuli usai memimpin Tim *Benchmarking* Sub Bagian Media Sosial DPR RI mengunjungi Ruang Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/8). Kunjungan ini terkait pelayanan informasi secara digital ke masyarakat.

“Sistem aplikasi dan layanan satu tempat di Kabupaten Banyuwangi cukup bagus, dan bisa menjadi acuan bagi seluruh Indonesia. Kita berguru ini manfaatnya agar kita bisa berkembang. Jadi kita tidak besar dalam tempurung, oh ternyata ada yang lebih bagus,” kata Djazuli.

Hal pertama yang disoroti Djazuli adalah terintegrasi seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, yaitu dengan adanya Mall Pelayanan Publik. Menurutnya, dengan adanya mall itu, menyiratkan bahwa di Kabupaten Banyuwangi tidak ada ego sektoral pada urusan pelayanan publik. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersinergi menjadi satu, sehingga

masyarakat mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya dalam satu tempat.

“Ini seluruhnya tidak ada istilah ego sektoral, semuanya menyatu untuk layanan publik. Saya berharap manfaat dari *benchmarking* ini kita akan terapkan di DPR RI, bagaimana kita memberikan pelayanan ke Anggota DPR RI, layanan ke Anggota itu bisa cepat, terintegrasi, tidak ego sektoral. Termasuk ke masyarakat juga,” ungkap Djazuli.

Djazuli menilai, layanan publik termasuk layanan media informasi itu dibutuhkan, agar seluruh permasalahan masyarakat cepat selesai. Menurutnya, momentum *benchmarking* ini dapat dijadikan ajang belajar bagi DPR RI dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

Mengingat, seharusnya DPR RI melayani, bukan dilayani. Dirinya mengaku akan mencoba menerapkan layanan informasi publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena orientasinya adalah layanan kepada masyarakat.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Juang Pribadi, mengaku senang atas adanya *benchmarking* dari DPR RI, terkait sistem pelayanan publik di Banyuwangi.

Menurutnya, hal itu tidak terlepas berkat adanya dukungan yang kuat dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang memang menjadikan Humas Protokol Banyuwangi sebagai ujung tombak dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kita selalu dipacu di setiap kegiatan untuk mempublikasikannya oleh Bupati Banyuwangi. Bupati sangat memberikan perhatian yang sangat besar sekali ke Humas Protokol Pemkab ini,” ucapnya.

Terkait Mall Pelayanan Publik, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Pemkab Banyuwangi Ninik Endah Prasetyowati yang juga sebagai kepala pengelola mall itu mengatakan, di dalam mall tersebut ada 20 SKPD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang mendatang akan hadir Bagian Imigrasi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, agar pelayanan lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat.

Ninik juga menjelaskan, mall ini diresmikan pada 06 Oktober 2017 lalu, dengan target Bupati Banyuwangi yang menginginkan adanya 60 pelayanan. “Alhamdulillah, dalam waktu 2 bulan sudah menjadi 86 bidang. Sampai hari ini sudah ada 178 bidang, sangat luar biasa,” imbuhnya.

Dirinya berharap, dengan adanya mall ini, masyarakat Banyuwangi bisa berbondong-bondong datang dan tidak merasa bahwa pelayanan dalam perizinan itu sulit. Dirinya meyakini bahwa perizinan itu mudah dan gratis.

Diketahui, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan tempat pelayanan terpadu, dimana semua pengurusan dokumen dilakukan di satu tempat. Pelayanan tersebut mulai dari administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP, beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, SAMSAT, pembayaran retribusi daerah, pernikahan hingga pembuatan SIM.

Sementara itu, Ruang Pelayanan Publik yang terletak di lingkungan Kantor Pemkab Banyuwangi diperuntukkan untuk memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat. Ruang yang sering disebut *lounge* ini dilengkapi berbagai fasilitas, salah satunya berbagai monitor yang menyajikan informasi terkait kinerja Pemkab Banyuwangi, seperti data APBD dan kinerja di setiap SKPD. ■ ndy/sf



Foto: Kresno | OD

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, dan duta besar negara sahabat.

WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)*. Forum ini merupakan inisiasi kedua DPR RI untuk merangkul parlemen negara sahabat bersama-sama membahas isu global, termasuk agenda 2030.

Forum yang digelar untuk kedua kalinya ini mengangkat tema “*Partnership Towards Sustainable Energiers for All*”, dan akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018 mendatang.

“Forum ini diselenggarakan DPR RI sebagai forum yang kedua kalinya dan akan mengundang puluhan negara untuk membicarakan tentang SDGs terutama goal ke-7 terkait penyediaan energi bersih dan terbarukan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam *Embassy Briefing* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. *Briefing* ini dihadiri para duta besar negara sahabat.

Fadli menjelaskan ketahanan energi sangat vital dan penting bagi masyarakat global, karena itu dibutuhkan kebijakan energi yang berkelanjutan. Mengingat, 70 persen kebutuhan energi global masih dipasok oleh energi fosil, seperti minyak, gas dan batu bara yang jumlahnya semakin lama semakin terbatas.

“Kita tidak mungkin hidup tanpa energi yang *sustainable*. Karena itu kita berharap terjadi diskusi dan dialog yang konstruktif dalam forum tersebut,” terang Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam hal ini parlemen

sebagai perwakilan rakyat memiliki peranan penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah melalui perundang-undangan dan hak anggaran. Karenanya, dukungan dan peran parlemen untuk mendorong pemerintah masing-masing negara lebih peduli terhadap sektor energi.

Hal senada disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Ia menuturkan, energi kerap kali menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global. Menurutnya, kebutuhan akan energi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia serta produktivitas masyarakat global.

“Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita selalu terganggu dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia, sehingga kita harus memfokuskan bahwa energi berkelanjutan menjadi prioritas bersama,” jelas Nurhayati.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ketahanan energi dan energi terbarukan juga sejalan dengan goal nomor 7 dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang mana tujuan ini dicanangkan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi masyarakat. ■ ann/sf



Suasana Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR- DPD RI dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Kamis (16/8). Foto: Iwan/Od



Penandatanganan dan penyerahan RUU tentang APBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (16/8). Foto: Andri/od



Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Buletin dan Majalah Parlemenaria Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke RSUP. Persahabatan Jakarta Timur (15/8) Foto : dok.pri